



Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) pada Kantor Desa Lumban Gorat Kecamatan Dolok Panribuan

Firman S. Sianturi¹, Amran Manurung², Audrey M. Siahaan³

¹⁻³Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

Email Korespondensi: firmansianturi@student.uhn.ac.id¹, amran.manurung@uhn.ac.id²,
audreysiahaan@uhn.ac.id³

*Penulis Korespondensi: firmansianturi@student.uhn.ac.id

Abstract. *This study examines the implementation of Village Government Accounting Standards (Standar Akuntansi Pemerintahan Desa/SAPDesa) at the Lumban Gorat Village Office, Dolok Panribuan District, Simalungun Regency, and its implications for the transparency of village financial reporting. The study was motivated by the importance of improving accountability and transparency in village financial management following the increasing allocation of village funds from the government. A qualitative descriptive approach was employed to obtain an in-depth understanding of the implementation of SAPDesa in practice. Data were collected through observations, semi-structured interviews with the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, and other village officials, as well as documentation of financial reports and administrative records. Data analysis followed the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source triangulation. The findings indicate that SAPDesa has generally been implemented in accordance with applicable regulations, supported by the use of financial recording systems and administrative procedures. Nevertheless, several challenges remain, including limited human resource capacity, technological facilities, and technical assistance. Overall, the implementation of SAPDesa has contributed to improving the quality, accountability, and transparency of village financial reporting, thereby strengthening public trust and supporting the realization of good governance in village administration.*

Keywords: *Accountability; SAPDesa; Transparency; Village Financial Management; Village Financial Reporting.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) pada Kantor Desa Lumban Gorat Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta mengkaji dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan perangkat desa, serta dokumentasi dokumen pengelolaan keuangan desa. Data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAPDesa di Kantor Desa Lumban Gorat telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pengelolaan keuangan yang lebih sistematis, didukung oleh pemanfaatan aplikasi Siskeudes, komitmen aparatur desa, serta pembinaan dari pemerintah daerah. Faktor yang memengaruhi implementasi SAPDesa meliputi kompetensi aparatur, dukungan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan pendampingan pemerintah. Penerapan SAPDesa memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, kualitas laporan keuangan, efektivitas pengawasan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Laporan Keuangan Desa; Pengelolaan Keuangan Desa; SAPDesa; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan desa pada era otonomi daerah menempatkan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus pelaksana pembangunan yang memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya dan keuangan secara mandiri. Peningkatan kewenangan tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Keuangan desa tidak lagi dipandang sebagai sekadar administrasi pencatatan penerimaan dan

pengeluaran, melainkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) memiliki peran strategis dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan standar tersebut juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip *good governance* secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. (Cahyani, Basri, & Kurnia, 2022).

Pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola keuangan desa melalui berbagai regulasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Besarnya alokasi dana desa setiap tahun menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi aparatur desa untuk mengelola anggaran secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, penerapan SAPDesa tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Walaupun berbagai kebijakan telah diterapkan, masih terdapat sejumlah desa yang menghadapi kendala dalam mengimplementasikan standar akuntansi secara optimal. Permasalahan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan kompetensi aparatur, rendahnya pemahaman terhadap prinsip akuntansi pemerintahan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan dan tingkat akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat. (Kusrawan, Liswatin, & Haris, 2022).

Implementasi SAPDesa pada dasarnya tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menuntut kesiapan organisasi dalam membangun sistem administrasi keuangan yang tertata dan berkesinambungan. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari pencatatan transaksi, pengelompokan akun, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pengelolaan aset desa, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai standar agar informasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Keberhasilan penerapan SAPDesa dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem pengendalian internal, komitmen pemerintah desa, serta penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang memadai. Apabila faktor-faktor tersebut belum berjalan secara optimal, maka kualitas informasi keuangan yang dihasilkan akan mengalami penurunan sehingga tujuan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa belum dapat tercapai secara maksimal. (Sholikhah, Sasana, & Priyono, 2023).

Kondisi tersebut juga menjadi perhatian pada Kantor Desa Lumban Gorat, Kecamatan Dolok Panribuan. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan dengan aparatur desa, diketahui bahwa pemerintah desa telah berupaya menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti belum meratanya pemahaman aparatur mengenai prinsip SAPDesa, keterbatasan pelatihan teknis, serta belum optimalnya penggunaan aplikasi pendukung dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, proses pencatatan transaksi, pengelolaan aset desa, dan penyusunan laporan keuangan masih memerlukan penyesuaian agar semakin sesuai dengan standar yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan SAPDesa di Desa Lumban Gorat masih memerlukan evaluasi yang lebih komprehensif sehingga dapat diketahui berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. (Harahap, Lubis, & Harahap, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Desa dari beragam perspektif. Sebagian besar penelitian berfokus pada tingkat kesesuaian laporan keuangan terhadap standar, pengaruh kompetensi aparatur, efektivitas sistem pengendalian internal, maupun pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan desa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan implementasi SAPDesa belum berjalan secara optimal pada beberapa desa. Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi sehingga belum memberikan gambaran yang mendalam mengenai proses implementasi, pengalaman aparatur desa, serta dinamika yang terjadi selama penerapan SAPDesa dalam aktivitas pengelolaan keuangan sehari-hari. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian yang mampu menggali fenomena tersebut secara lebih komprehensif melalui pendekatan kualitatif. (Ruspiana & Nafsiah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat *research gap* karena penelitian mengenai penerapan SAPDesa di wilayah Sumatera Utara, khususnya pada Kantor Desa Lumban Gorat Kecamatan Dolok Panribuan, masih sangat terbatas dan belum banyak mengkaji implementasi standar akuntansi dari sudut pandang pengalaman serta pemahaman aparatur desa. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan pada tingkat kepatuhan penyusunan laporan keuangan tanpa menjelaskan secara mendalam bagaimana proses implementasi berlangsung, kendala yang dihadapi, maupun strategi yang dilakukan aparatur desa dalam mengatasinya. Kondisi tersebut melahirkan *gap question*, yaitu bagaimana penerapan SAPDesa dilaksanakan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa, kendala apa saja yang dihadapi aparatur desa

selama proses implementasi, serta bagaimana persepsi mereka terhadap SAPDesa sebagai instrumen akuntabilitas publik. *Novelty* penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan praktik penerapan SAPDesa, persepsi aparatur desa, penggunaan sistem pengelolaan keuangan desa, serta berbagai faktor penghambat dan pendukung implementasi dalam satu kajian kualitatif yang berfokus pada konteks lokal Desa Lumban Gorat. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. (Tetelepta & Talakua, 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan suatu sistem akuntansi yang diterapkan pada organisasi pemerintahan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Penerapan akuntansi sektor publik bertujuan menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntansi sektor publik memiliki peranan penting karena menjadi dasar dalam proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, hingga penyusunan laporan keuangan desa yang mencerminkan kondisi keuangan secara nyata. Informasi keuangan yang dihasilkan tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan demikian, penerapan akuntansi sektor publik menjadi fondasi penting dalam mendukung implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) sehingga pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara profesional, tertib administrasi, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. (Cahyani, Basri, & Kurnia, 2022).

Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)

Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) merupakan pedoman yang digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan proses pencatatan, pengukuran, penyajian, serta pelaporan keuangan secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan SAPDesa bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami oleh seluruh pengguna informasi

keuangan. Selain menjadi pedoman administratif, SAPDesa juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Pelaksanaan SAPDesa mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SAPDesa sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance*. (Ruspiana & Nafsiah, 2025).

Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi laporan keuangan merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai seluruh aktivitas pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Keterbukaan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana desa, hingga pertanggungjawaban keuangan secara jelas dan mudah dipahami. Informasi yang disajikan secara transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat fungsi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Penerapan SAPDesa mendukung terciptanya transparansi karena setiap transaksi keuangan dicatat berdasarkan standar yang berlaku sehingga menghasilkan informasi yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, transparansi laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Erayanti, Basri, & Azlina, 2023).

Akuntabilitas Keuangan Publik

Akuntabilitas keuangan publik merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan keuangan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang lengkap, benar, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sehingga dapat menjadi dasar dalam proses evaluasi maupun pengawasan. Selain berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan, akuntabilitas juga mencerminkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan desa. Penerapan SAPDesa memberikan pedoman yang jelas mengenai proses pencatatan, penyajian, hingga pelaporan keuangan sehingga informasi yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Oleh sebab itu, akuntabilitas menjadi unsur yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa sekaligus

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. (Az-Zahra, Nurbaiti, & Syafina, 2023).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAPDesa

Keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi pemerintahan desa. Faktor internal meliputi kompetensi sumber daya manusia, komitmen aparatur desa, kepemimpinan kepala desa, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pembinaan dari pemerintah daerah, pendampingan teknis, kebijakan pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Sinergi seluruh faktor tersebut akan mendukung penerapan SAPDesa secara optimal sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila salah satu faktor belum berjalan secara optimal, maka proses pengelolaan maupun pelaporan keuangan desa berpotensi mengalami kendala yang dapat memengaruhi kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. (Sholikhah, Sasana, & Priyono, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) pada Kantor Desa Lumban Gorat, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun. Penelitian dilaksanakan mulai Januari 2026 hingga seluruh tahapan penelitian selesai. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pengungkapan proses implementasi SAPDesa, persepsi aparatur desa, serta berbagai kendala yang muncul dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, serta aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan sebagai landasan konseptual sekaligus bahan pendukung dalam proses analisis.

Metode penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi agar informasi yang diperoleh lebih komprehensif serta sesuai dengan kondisi empiris di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk memahami secara

langsung praktik pengelolaan keuangan desa, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai mekanisme penyusunan laporan keuangan, tingkat pemahaman aparatur terhadap SAPDesa, pemanfaatan aplikasi pendukung, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Dokumentasi dimanfaatkan sebagai bukti pendukung melalui penelaahan terhadap APBDes, Laporan Realisasi Anggaran, Buku Kas Umum, buku pembantu, serta dokumen administrasi lainnya. Keabsahan data dijaga menggunakan teknik triangulasi melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data secara naratif, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan sehingga menghasilkan temuan yang sistematis, kredibel, dan mampu menjawab fokus penelitian secara menyeluruh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) pada Kantor Desa Lumban Gorat Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya terhadap transparansi laporan keuangan desa. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparatur desa, dan dokumentasi berbagai dokumen pengelolaan keuangan desa. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan SAPDesa di lapangan. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan diuraikan secara deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap setiap temuan penelitian. Adapun hasil dan pembahasan penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Wawancara Penerapan SAPDesa dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

No	Aspek	Hasil Temuan
1	Proses pencatatan keuangan	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, serta didukung aplikasi Siskeudes dan Microsoft Excel.
2	Penyusunan laporan	Pemerintah desa menyusun APBDes, Laporan Realisasi APBDes, serta Catatan atas Laporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
3	Penerapan standar	Aparatur desa telah berupaya menerapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan.
4	Pendampingan	Penyusunan laporan masih memperoleh pendampingan dari pemerintah kecamatan agar meminimalkan kesalahan administrasi.
5	Transparansi	Informasi keuangan disampaikan melalui media informasi desa sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran desa.

Sumber: Hasil Wawancara dan Dokumentasi Peneliti (2026).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Kantor Desa Lumban Gorat menunjukkan bahwa proses penyusunan laporan keuangan telah mengikuti tahapan yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Seluruh transaksi penerimaan maupun

pengeluaran dicatat secara sistematis melalui Buku Kas Umum dan buku pembantu sebelum disusun menjadi laporan keuangan. Penggunaan aplikasi Siskeudes dan Microsoft Excel membantu aparatur desa meningkatkan ketelitian dalam pencatatan serta mempermudah proses penyusunan laporan secara periodik. Meskipun demikian, aparatur desa masih memerlukan pendampingan dari pemerintah kecamatan terutama pada tahap verifikasi laporan agar kesalahan administrasi dapat diminimalkan dan laporan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Ruspiana & Nafsiah, 2025).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan SAPDesa tidak hanya berorientasi pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa. Aparatur desa telah memahami pentingnya pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat maupun pihak pengawas. Penyampaian informasi melalui media publik desa turut memperkuat prinsip transparansi karena masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui realisasi penggunaan anggaran. Kondisi tersebut mencerminkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, terbuka, dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. (Az-Zahra, Nurbaiti, & Syafina, 2023).

Tabel 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

No.	Aspek	Hasil Temuan
1	Kompetensi Aparatur	Aparatur desa telah memahami dasar pengelolaan keuangan, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang berkelanjutan mengenai SAPDesa dan penyusunan laporan keuangan berbasis standar.
2	Pemanfaatan Teknologi	Penggunaan aplikasi Siskeudes dan Microsoft Excel membantu proses pencatatan keuangan, meskipun masih terdapat keterbatasan sarana pendukung dan kemampuan teknis sebagian aparatur.
3	Pendampingan Pemerintah	Pemerintah kecamatan dan kabupaten memberikan pembinaan, monitoring, dan evaluasi sehingga proses penyusunan laporan keuangan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
4	Komitmen Aparatur	Aparatur desa memiliki komitmen untuk menyusun laporan keuangan secara tertib, transparan, dan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi Peneliti (2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SAPDesa di Kantor Desa Lumban Gorat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Kompetensi aparatur desa menjadi faktor utama karena kemampuan dalam memahami regulasi, melakukan pencatatan transaksi, serta menyusun laporan keuangan sangat menentukan kualitas implementasi SAPDesa. Aparatur yang telah mengikuti bimbingan teknis mampu menyelesaikan proses administrasi dengan lebih baik, sedangkan aparatur yang belum memperoleh pelatihan intensif masih membutuhkan pendampingan dalam memahami

perubahan regulasi maupun prosedur pelaporan keuangan desa. Selain itu, komitmen aparatur untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan menjadi modal penting dalam menjaga konsistensi penerapan standar akuntansi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. (Ruspiana & Nafsiah, 2025).

Pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi *Siskeudes* dan penggunaan *Microsoft Excel* memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan desa. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung dan kemampuan teknis sebagian aparatur sehingga proses penyusunan laporan belum sepenuhnya optimal. Di sisi lain, pendampingan dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten membantu aparatur desa dalam menyesuaikan praktik pengelolaan keuangan dengan ketentuan yang berlaku. Sinergi antara kompetensi sumber daya manusia, dukungan teknologi, pembinaan pemerintah, dan komitmen aparatur menjadi faktor yang memperkuat keberhasilan penerapan SAPDesa sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan. (Sholikhah, Sasana, & Priyono, 2023).

Tabel 3. Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) terhadap Transparansi Laporan Keuangan Desa Lumban Gorat.

No.	Aspek	Hasil Temuan
1	Keterbukaan Informasi	Informasi mengenai APBDes, realisasi anggaran, dan penggunaan dana desa telah disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi desa dan forum musyawarah.
2	Akuntabilitas	Laporan keuangan disusun sesuai prosedur sehingga memudahkan proses pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
3	Kepercayaan Masyarakat	Penyajian laporan keuangan yang lebih sistematis meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.
4	Pengawasan	Laporan keuangan yang tersusun berdasarkan SAPDesa memudahkan pengawasan oleh BPD, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi Peneliti (2026).

Penerapan SAPDesa di Kantor Desa Lumban Gorat memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan transparansi laporan keuangan desa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi penggunaan anggaran melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat. Penyajian laporan keuangan yang mengikuti ketentuan SAPDesa membuat informasi menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat dijadikan dasar dalam proses evaluasi maupun pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan desa. (Erayanti, Basri, & Azlina, 2023).

Selain meningkatkan keterbukaan informasi, penerapan SAPDesa juga memperkuat akuntabilitas aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Laporan keuangan yang disusun secara sistematis memudahkan Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan desa. Kejelasan informasi yang disajikan turut meningkatkan kepercayaan masyarakat karena setiap transaksi dapat ditelusuri berdasarkan dokumen pendukung yang tersedia. Walaupun masih terdapat beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap isi laporan keuangan, secara umum penerapan SAPDesa telah memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Az-Zahra, Nurbaiti, & Syafina, 2023).

Tabel 4. Sintesis Hasil Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) pada Kantor Desa Lumban Gorat.

No.	Fokus Analisis	Temuan Penelitian	Implikasi
1	Penerapan SAPDesa	Proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada ketentuan SAPDesa melalui pemanfaatan <i>Siskeudes</i> dan administrasi keuangan desa.	Pengelolaan keuangan menjadi lebih sistematis, tertib, dan sesuai dengan regulasi.
2	Faktor Pendukung	Kompetensi aparatur, komitmen pemerintah desa, pendampingan pemerintah daerah, serta penggunaan teknologi informasi mendukung implementasi SAPDesa.	Mempercepat proses penyusunan laporan keuangan dan mengurangi kesalahan administrasi.
3	Faktor Penghambat	Masih terdapat keterbatasan kemampuan teknis sebagian aparatur, sarana pendukung yang belum optimal, serta perlunya pelatihan secara berkelanjutan.	Kualitas pelaporan belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa.
4	Dampak Implementasi	Penerapan SAPDesa meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengawasan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.	Tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih profesional serta mendukung penerapan <i>good governance</i> .

Sumber: Hasil Analisis Peneliti Berdasarkan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi (2026).

Hasil sintesis penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAPDesa di Kantor Desa Lumban Gorat telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, terutama pada aspek pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Aparatur desa memanfaatkan *Siskeudes* sebagai sarana utama dalam mendukung administrasi keuangan sehingga proses penyusunan laporan menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Keberhasilan implementasi tersebut didukung oleh komitmen pemerintah desa, pendampingan dari pemerintah daerah, serta koordinasi antaraparatur yang semakin baik dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa. (Ruspiana & Nafsiah, 2025).

Di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa implementasi SAPDesa masih menghadapi beberapa tantangan, terutama berkaitan dengan kompetensi teknis sebagian aparatur dan keterbatasan sarana pendukung administrasi. Kendala tersebut belum

menghambat pelaksanaan pengelolaan keuangan secara keseluruhan, tetapi memerlukan perhatian melalui pelatihan yang berkesinambungan dan penguatan pemanfaatan teknologi informasi. Secara umum, penerapan SAPDesa memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengawasan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, dan berlandaskan prinsip *good governance*. (Sholikhah, Sasana, & Priyono, 2023).

Pembahasan Penelitian

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lumban Gorat telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa dalam proses pengelolaan keuangan mulai dari pencatatan transaksi, penyusunan laporan realisasi anggaran, hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban. Pemanfaatan aplikasi *Siskeudes* serta pencatatan administrasi yang didukung dokumen pelengkap membantu aparatur desa menghasilkan laporan keuangan yang lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun masih terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan administrasi, secara umum implementasi SAPDesa telah mendukung terciptanya pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib, efektif, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (Ruspiana & Nafsiah, 2025).

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAPDesa

Penerapan SAPDesa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari internal *maupun* eksternal organisasi pemerintahan desa. Kompetensi aparatur, komitmen pemerintah desa, ketersediaan sarana teknologi informasi, serta pendampingan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi SAPDesa. Aparatur yang memiliki pemahaman memadai mengenai regulasi dan prosedur akuntansi mampu menyusun laporan keuangan dengan lebih baik dibandingkan aparatur yang masih memerlukan pembinaan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan secara berkelanjutan menjadi kebutuhan penting agar kualitas penerapan SAPDesa semakin meningkat. (Sholikhah, Sasana, & Priyono, 2023).

Analisis Dampak Penerapan SAPDesa terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Penerapan SAPDesa memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi laporan keuangan Desa Lumban Gorat. Penyusunan laporan yang mengikuti standar akuntansi pemerintah menghasilkan informasi keuangan yang lebih jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh masyarakat maupun pihak pengawas. Informasi mengenai pendapatan, belanja, serta realisasi penggunaan anggaran dapat disampaikan secara terbuka melalui media informasi desa

dan forum musyawarah sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi tersebut juga mendorong terciptanya pengawasan publik yang lebih efektif dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. (Erayanti, Basri, & Azlina, 2023).

Analisis Implikasi Penerapan SAPDesa terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa

Secara keseluruhan, penerapan SAPDesa memberikan implikasi yang positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa Lumban Gorat. Standar akuntansi yang diterapkan mampu memperkuat akuntabilitas aparatur desa, meningkatkan ketertiban administrasi keuangan, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi keuangan yang andal. Di samping itu, penerapan SAPDesa juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat melalui peningkatan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAPDesa menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip *good governance*. (Az-Zahra, Nurbaiti, & Syafina, 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) pada Kantor Desa Lumban Gorat Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku melalui proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Implementasi SAPDesa didukung oleh pemanfaatan aplikasi *Siskeudes*, komitmen aparatur desa, serta pendampingan dari pemerintah daerah, meskipun masih dijumpai beberapa kendala berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan sarana pendukung administrasi. Penerapan SAPDesa memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, kualitas laporan keuangan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan yang berkelanjutan, penguatan sistem pengendalian internal, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dilakukan agar pengelolaan keuangan desa semakin efektif, profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR REFERENSI

- Az-Zahra, S. F., Nurbaiti, N., & Syafina, L. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pertanggungjawaban keuangan desa. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 9(1), 56–67. <https://doi.org/10.25134/jrka.v9i1.7635>
- Cahyani, C. Z., Basri, Y. M., & Kurnia, P. (2022). Accountability, transparency, competence of village apparatus, and internal control system in village financial management. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 77–94. <https://doi.org/10.20473/baki.v7i1.30786>
- De Grave, A., & Hasan, S. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. *Akuntabilitas*, 15(2), 177–190. <https://doi.org/10.15408/akt.v15i2.25475>
- Defitri, S. Y. (2022). Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 8(1), 40–49. <https://doi.org/10.53494/jira.v8i1.100>
- Erayanti, F., Basri, Y. M., & Azlina, N. (2023). Good governance pemerintah desa: Apakah dipengaruhi standar akuntansi pemerintah, gaya kepemimpinan, budaya organisasi? *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 6(2), 12–26. <https://doi.org/10.35837/subs.v6i2.1257>
- Harahap, R., Lubis, F. A., & Harahap, R. D. (2023). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa: Studi kasus Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(4), 199–207. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.876>
- Kusrawan, K., Liswatin, L., & Haris, T. S. (2022). Pengaruh transparansi, kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Barowila. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2767–2773. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.780>
- Kusuma, D., & Ardhiarisca, O. (2022). Analisis pengaruh kompetensi perangkat desa dan peran aplikasi sistem keuangan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i1.3206>
- Laelasari, L., & Suwarno, S. (2022). Siklus pengelolaan keuangan desa: Dari perencanaan sampai pelaporan (Studi kasus pada Desa Sukaraja Bogor). *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(2), 157–170. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i2.1495>
- Ruspiana, M., & Nafsiah, S. N. (2025). Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDESA) pada Kantor Desa Cempaka Sakti. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 21(4). <https://doi.org/10.31851/jmwv21i4.16557>
- Sholikhah, A. L., Sasana, H., & Priyono, N. (2023). Pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi empiris pada desa se-Kabupaten Jepara). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 9–20. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1486>
- Sujatnika, I. N. J., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Pengaruh sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten

Klungkung. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 378–388.
<https://doi.org/10.23887/jap.v13i2.26220>

Tetelepta, J. M., & Talakua, V. A. (2025). Efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tentang transparansi pelaporan keuangan desa: Pendekatan pemodelan persamaan struktural. *Journal of Applied Accounting*, 4(2), 147–163.
<https://doi.org/10.52158/jaa.v4i2.1481>

Wulandari, W., & Rahmadani, I. (2024). The application of government accounting standards in social service financial reports. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(1), 127–134.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i1.2453>

Zai, E., Zebua, S., Waruwu, N. A., & Zebua, D. I. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada laporan keuangan desa di Desa Tegide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 1787–1799. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4771>